

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA REFORMASI

Marzuenda

Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru
marzuenda84@gmail.com

Usman

UIN SUSKA Riau
Email. Usman1969@uin-suska.ac.id

ABSTRAKSI

Perkembangan lembaga pendidikan islam di masa reformasi masih mengalami kelemahan di antaranya kelemahan sumber daya manusia, lembaga pendidikan islam belum mampu mewujudkan cita-cita idealnya dan masih kurangnya minat masyarakat dengan pendidikan islam, di era reformasi pendidikan agama berhenti pada simbol tanpa tahu menjalankan aturan dan perintah agama.

Dalam kebijakan pendidikan islam ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya faktor agama, faktor ideologi negara, faktor perkembangan masyarakat, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Dari faktor tersebut lembaga pendidikan islam perlu perhatian untuk meningkatkan kebijakan dalam kemajuan dunia pendidikan islam.

Hal ini terlihat dari perkembangan dunia pendidikan islam di masa reformasi masih banyak kekurang diantaranya suri tauladan yang tidak memberikan contoh yang baik kepada pendidik, mata pelajaran pendidikan islam tidak mata pelajaran wajib padahal kita tau untuk menjalani ibadah dan akhlak sehari-hari dari pelajaran agama, pemerintah setengah-setengah dalam memberikan kebijakan pendidikan islam, perlunya pembinaan untuk guru pendidikan islam dalam menyatukan visi dan misi pendidikan Islam.

Kata kunci : Reformasi, pendidikan, Islam.

ABSTRACTION

The development of Islamic educational institutions during the reformation period still experienced weaknesses including the weakness of human resources, Islamic educational institutions have not been able to realize their ideals and there is still a lack of public interest in Islamic education. religion.

In Islamic education policy there are several factors that influence it including religious factors, state ideology factors, community development factors, scientific development factors. From these factors, Islamic educational institutions need attention to improve policies in the advancement of the world of Islamic education.

This can be seen from the development of the world of Islamic education during the reformation period, there are still many shortcomings including role models who do not provide good examples to educators, Islamic education subjects are not compulsory subjects even though we know to carry out daily worship and morals from religious lessons, government half-measures in providing Islamic education policies, the need for guidance for Islamic education teachers in unifying the vision and mission of Islamic education.

Keywords: Reformation, education, Islam

A. INTRODUCTION

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai dengan keinginan, ukuran dan model dari orang yang memakainya. sehingga tampak pas dan serasi.

Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat. adat

istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya¹.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan meng "anak tirikan", mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan "Indonesia bukanlah negara Islam". Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu "diredam" untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, yaitu " Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. cakap, kreatif, mandiri. dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"².

Hingga saat ini kita menyadari bahwa secara umum kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditandai oleh berbagai kelemahan, antara lain :

Pertama, kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen maupun dana. Sementara itu kita mengetahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen dan dana³.

Kedua, kita menyadari bahwa saat ini lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain masyarakat masih memposisikan

¹ Nurhayati Jamas. *Dinamika pendidikan islam di Indonesia pasca kemerdekaan*. Rajawali Prees. Jakarta. 2009 hal. 193

² UU. RI No. 23 tahun 2003. *Tentang sistem pembangunan Nasional*. Citra Umbara. Bandung. 2010. Hal. 23

³ Plet A. Sahertian. *Konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000. Hal. 14

lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam.

Ketiga, kita masih melihat lembaga pendidikan tinggi Islam belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Kita masih melihat bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada dataran simbol dan formalistik.

Keempat, pada saat ini kita hidup dalam era reformasi. Pada era ini kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani demikian kuat, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya.

Kelima, hingga saat ini posisi lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga pendidikan Islam yang ada di bawahnya masih kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label Islam.

Berbagai kelemahan di atas paling tidak merupakan persoalan yang harus dijawab oleh sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena pendidikan memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

B. RESEARCH METHODS

Penelitian dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif memakai studi kepustakaan dalam melakukan risetnya. Studi *library* pada beberapa artikel jurnal, buku-buku terkait, majalah, dan beberapa tulisan di media sosial. Data diinput melalui teknik pengumpulan data, pengolahan dan pemilahan data serta

penyajian data setelah melakukan pengolahan data dengan *content analysis* (analisis isi).⁴

c. DISCUSSION

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam

1. Faktor Agama

Di dalam proses pembudayaan manusia, keberadaan pendidikan mutlak diperlukan. Bukan saja karena ia merupakan produk sejarah dan masyarakat, melainkan juga karena peranannya yang asasi dalam pembentukan hari depan. Di atas peranannya ini terletak tugas dan tanggung jawab kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakat. Rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut dapat dirumuskan⁵.

Berkaitan dengan visi *rahmatan lil alamin* sebagaimana firman Allah SWT. (QS. 21: 107), Imam al-Maraghi mengatakan sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan ayat 107 surat al-Ambiya yang artinya : "*Tidaklah Aku utus engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam* adalah bahwa tidaklah Aku utus engkau Muhammad dengan Al-Qur'an ini serta berbagai perumpamaan dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya⁶.

Visi pendidikan Islam yang bertumpu pada mewujudkan rahmat bagi seluruh alam itu, memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki sebuah tanggung jawab yang amat berat, kompleks, multidimensi dan berjangka panjang. Visi pendidikan Islam terkait erat dengan upaya mewujudkan sebuah tata

⁴ Nurliana, N. (2017). Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab Subul Al-Salam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(2), 132-174.

⁵ Dardiri Husni, et.all. *Sejarah islam Asia tenggara*. Institut Asean Islamic Studies Universitas Islam Negeri Riau. Bekerjasama dengan ALAF Riau. 2006. Hal 54

⁶ Muhmudayeli. *Filsafat pendidikan*. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hal. 186

kehidupan yang harmoni, aman, damai, sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan misi ajaran Islam yang memuliakan manusia yang demikian itu, menjadi misi pendidikan Islam. Terwujudnya manusia yang sehat jasmani, rohani dan akal pikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak yang mulia, keterampilan hidup (*skill life*), yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diberikan oleh Allah termasuk pula mengelola kekayaan alam yang ada di daratan, di lautan, bahkan di ruang angkasa adalah merupakan misi pendidikan Islam.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab pendidikan dengan segala jenisnya tidak hanya berdimensi duniawi, melainkan juga berdimensi ukhrawi dalam satu kesatuan yang integral. Sehingga pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab membantu setiap pribadi muslim untuk merealisasikan misi hidupnya⁷.

Ketika menghadapi tantangan-tantangan modernisasi dan polarisasi ideologi dunia, terutama didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pendidikan Islam tidak terlepas dari tantangan yang menuntut jawaban segera. Secara garis besar tantangan-tantangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdapat kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai yang sudah ada (agama). Standar-standar kehidupan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Dan inilah titik sentral masalah modernisasi yang menjadi akar timbulnya masalah-masalah di semua aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik⁸.
- b. Adanya dimensi besar dari kehidupan masyarakat modern yang berupa pemusatan pengetahuan teoritis. Ini berarti bertambahnya ketergantungan manusia pada ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber strategis pembaharuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan

⁷ Abu Ahmadi. *Ilmu pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001 hal. 108

⁸ Amsal Bahktiar. *Filsafat ilmu*. Raja Grafindo. Persada. Jakarta. 2010. Hal 223

menimbulkan depersonalisasi dan keterasingan dalam dunia modern⁹.

Dalam menghadapi tantangan di atas, sudah barang tentu pendidikan Islam harus memperhitungkan kekuatan arus yang mengitarinya seperti sistem Barat yang bercorak sekuler dan telah memasuki semua aspek kehidupan manusia. Begitu juga halnya modernisasi harus dipahami sebagai proses alamiah dalam evolusi kehidupan manusia.

Pemahaman sebagaimana di atas menuntut kepekaan terhadap gejala perubahan dengan segala implikasinya serta kemampuan baru untuk menerjemahkan setiap perubahan ke dalam proses pendidikan. Dengan cara seperti itu akan membuka kemungkinan untuk melahirkan pribadi-pribadi muslim yang kelenturan berpikir, daya intelektual serta keterbukaan dalam menghadapi perubahan cara hidup.¹⁰ Bertolak dari kenyataan tersebut, dalam konteks perubahan sosial ini pendidikan Islam mempunyai misi ganda, yaitu:

- a. Mempersiapkan manusia muslim untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi, mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut, menciptakan kerangka berpikir yang komprehensif dan dinamis bagi terselenggaranya proses perubahan yang berada diatas nilai-nilai Islam.
- b. Memberikan solusi terhadap eksese-eksese negatif kehidupan modern yang berupa depersonalisasi, frustasi dan keterasingan umat dari dunia modern.

2. Faktor Ideologi Negara

Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: *Pertama*, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. *Kedua*, dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia.

⁹ Ibid. Hal 224

¹⁰ Nurliana, N. (2017). Wanita Karir Menurut Hukum Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 70-100.

Penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya baik dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.

Eksistensi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat penuh. Bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membangun dan mengembangkan bangsa dengan Pancasila sebagai landasan Ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Sejak dari awal Indonesia merdeka, pemerintah telah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini dapat kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada alinea keempat dinyatakan bahwa Pancasila menjadi dasar negara¹¹.

Namun apabila ditengok kembali perjalanan sejarah para pemimpin nomor satu di negeri ini dalam menafsirkan ideologi Pancasila dan mengimplementasikannya terhadap pendidikan Islam, dapat di bagi menjadi tiga orde (masa):

1. Orde Lama

Pancasila sebagai ideologi negara dianggap telah mewakili cita-cita semua agama dan golongan, termasuk umat Islam. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa semua agama itu sama, karena semua agama bertujuan untuk mencapai kebaikan hidup manusia. Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya berulang kali berhasil "menjinakkan" dan mementahkan perjuangan politik Islam yang kemudian berimbas ke pendidikan Islam. Penjinakan itu berupa

¹¹Syafrizal Rambe. *Serikat islam pelopor Nasionalisme Indonesia*. Yayasan kebangkitan insan cendikia. 2008. Hal 198

memarginalisasi partai politik Islam dan aspirasi umat Islam dengan alasan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh kongkretnya adalah menghapus tujuh kata dalam "Piagam Jakarta" dalam UUD 45 " Dengan Kepercayaan¹² Terhadap Allah Yang Maha Kuasa".

2. Orde Baru

Pada awal pemerintahannya Presiden Soeharto mengadakan konsolidasi yang diiringi dengan kebijakan yang represif terhadap islam. Karena Soeharto melihat Islam sebagai ancaman. Maka antara Pemerintah dan islam selalu ada hubungan antagonis yaitu hubungan yang saling curiga dan saling tidak percaya¹³.

Pada pertengahan pemerintahannya Presiden Suharto mencetuskan idiologi Pancasila sebagai asas tunggal untuk partai politik dan keagamaan. Hubungan antara pemerintah dan umat Islampun makin menegang. Peristiwa " Tanjung Priok " 12 September 1984, yang memakan ratusan korban adalah salah satu contohnya.¹⁴

3. Orde Reformasi

Dengan bergulimya masa reformasi yang ditandai dengan demokratisasi sebagai salah satunya, membawa angin segar bagi pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam. Keluamya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi managerial dan proses Pendidikan Islam. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut secara eksplisit, mengatur bagaimana seharusnya Pendidikan Keagamaan Islam dan Keagamaan diselenggarakan.

Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan : Pendidikan Keagamaan meliputi Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Pasal ini merupakan pasal umum untuk menjelaskan ruang lingkup Pendidikan

¹² Badri Yatim. *Sejarah peradaban islam*. Dirasah islamiyah II. Raja Grafindo persada. Jakarta. 2008. Hal 265

¹³ Ibid. Hal 266

¹⁴ Nasution, S. TRANSFORMASI MASYARAKAT ISLAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4. 0.

Keagamaan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan tentang siapa yang menjadi pengelola yaitu Menteri Agama.

Hanya saja realitas yang ada sampai saat ini masih terkesan, secara kelembagaan Pendidikan Islam menempati posisi kedua setelah Pendidikan Nasional. Sebuah lembaga yang menawarkan Pendidikan Islam kurang banyak diminati jika dibanding dengan lembaga lain yang dianggap lebih menjanjikan. Dan sampai saat inipun, posisi Pendidikan Islam belum beranjak dari sekedar sebuah subsistem dan sistem Pendidikan Nasional.

3. Faktor Perkembangan Masyarakat

Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya mau tidak mau akan menuju kepada masyarakat informasi (*informatical society*) sebagai kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern. Jika masyarakat modern memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi ke depan, bersikap terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif, maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belum cukup. Pada masyarakat informasi, manusia selain harus memiliki ciri-ciri masyarakat modern pada umumnya, juga harus memiliki ciri-ciri lain, yaitu menguasai dan mampu mendaya gunakan arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar (serba ingin tahu), mampu menjelaskan, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi¹⁵.

Pada masyarakat informasi peranan media elektronika sangat memegang peranan penting dan bahkan menentukan corak kehidupan. Penggunaan teknologi elektronika seperti komputer, faksimile, internet dan lain-lain telah mengubah lingkungan informasi dari lingkungan yang bercorak lokal dan nasional, kepada lingkungan yang bersifat internasional, mendunia dan global. Pada era informasi, lewat komunikasi satelit dan komputer orang memasuki lingkungan informasi

¹⁵ Abu Ahmadi. *Sosiologi pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 213

dunia¹⁶.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya strategis, antara lain:

- a. Tujuan pendidikan di masa sekarang tidak cukup hanya dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketakwaan saja, tetapi juga harus diarahkan pada upaya melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif, mengingat dunia yang akan datang adalah dunia yang kompetitif.
- b. Guru di masa mendatang adalah guru yang selain memiliki informasi, berakhlak baik dan mampu menyampaikannya secara metodologis, juga harus mampu mendayagunakan berbagai sumber informasi yang tersebar di masyarakat ke dalam kegiatan belajar. Dengan demikian pembelajaran harus lebih memusat pada siswa yang pada gilirannya dapat menimbulkan masyarakat belajar.
- c. Bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan diberikan kepada siswa sebagai bekal yang dapat memiliki pribadi yang utuh, yaitu pribadi disamping berilmu pengetahuan juga harus berakhlak mulia. Hal ini penting karena kehidupan masa mendatang banyak dihadapkan pada tantangan yang bersifat moral. Untuk itu, perlu dikembangkan pengamalan akhlak di sekolah-sekolah¹⁷.

4. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan teknologi dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), IPTEK bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa dan

¹⁶ Ibid. Hal 215

¹⁷Ramayulis dan Syamsul Nizar. *Filsafat pendidikan islam*. Telaah sistem pendidikan dan pemikiran para tokohnya. Kalam mulia. Jakarta. 2009. Hal 295

negara.¹⁸

Sekarang yang menjadi persoalan sekaligus pertanyaan bagi kita tentunya adalah bagaimana dengan eksistensi pendidikan Islam dalam menghadapi arus perkembangan IPTEK yang sangat pesat tersebut. Bagaimanapun tampaknya pendidikan Islam (terutama lembaganya) dituntut untuk mampu mengadaptasikan dirinya dengan kondisi yang ada. Disamping dapat mengadaptasi dirinya, pendidikan Islam juga dituntut untuk menguasai IPTEK, dan kalau perlu merebutnya. Banyak sekali di negara maju Instruksional yang membingungkan gurunya, teknologi seharusnya membantu peran guru, kalau tidak akan menimbulkan De-humanisasi pendidikan atau penduduk yang menghilangkan unsur-unsur manusia¹⁹.

Menurut Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, ada lima prinsip yang harus diikuti untuk mencapai penguasaan IPTEK yaitu :

- a. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang IPTEK yang relevan dengan pembangunan bangsa.
- b. Mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha serius dalam merealisasikan konsep tersebut.
- c. Adanya transfer, aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah-masalah nyata.
- d. Kemandirian teknologi, tanpa harus bergantung ke luar negeri.
- e. Perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di arena internasional.

Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan IPTEK itu mencakup ruang lingkup:

- a. Motivasi kreatifitas anak didik ke arah pengembangan IPTEK itu sendiri, dimana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuannya.

¹⁸ Nurliana, N. (2019). FORMULASI KELUARGA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 127-144.

¹⁹ Nasution. *Teknologi pendidikan* . Bumi Aksara. Jakarta. 2010. Hal 100

- b. Mendidik keterampilan, memanfaatkan produk IPTEK bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
- c. Menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan IPTEK, dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas IPTEK dalam bidang masing-masing.
- d. Menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumber-sumbernya yang murni dan kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia.

Dari ketiga orientasi tersebut, tampaknya hubungan dengan alam sekitar menjadi dasar pengembangan IPTEK, sedang *Hablumminallah* menjadi dasar pengembangan sikap dedikasi dan moralitas yang menjiwai pengembangan IPTEK, sedang *Hablumminannas* menjadi dasar pengembangan hidup bermasyarakat yang berpolakan atas kesinambungan, keserasian, dan keselarasan dengan nilai-nilai moralitas yang berfungsi menentramkan jiwa manusia, sehingga terciptalah kedamaian.²⁰

D. CONCLUSION

Dari pemaparan makalah ini, sebagai alternatifnya, saya akan mengambil kesimpulan :

1. Reformasi Pendidikan Islam / PAI semestinya berawal dari paradigma spiritual yang bercorak rasional begitu pula disiplin ilmu Non-PAI yang rasional perlu dihindari dengan nilai spiritual.
2. Proses penalaran / intelek semestinya berpihak kepada kebenaran dan kemanusiaan.
3. Suri tauladan dari civitas Akademika perlu dibina.

²⁰ Nurliana, N., & Ulya, M. (2019). Pendidikan Berbasis Motivasi. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(2), 393-412.

4. Kebijakan pemerintah sebaiknya jangan sampai menjadikan pendidikan islam hanya sebagai lipstik yang cenderung di Anak tirikan.
5. Pendidikan Islam / PAI semestinya menjadi mata ujian negara sebagaimana bahasa Indonesia, sebab untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya tidak hanya cukup dengan sains saja, apalagi sains yang sekuler saja.
6. Para guru / dosen Pendidikan Islam / PAI perlu dibina dalam rangka menyatukan visi, misi dan strategi.

BIBLIOGRAFI

- Ahmadi. Abu. *Ilmu pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001
- Ahmadi. Abu. *Sosiologi pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- Bahktiar. Amsal. *Filsafat ilmu*. Raja Grafindo. Persada. Jakarta. 2010
- Dardiri Husni, et.all. *Sejarah islam Asia tenggara*. ISAIS UIN SUSKA Riau. Bekerjasama dengan ALAF Riau. 2006
- Jamas Nurhayati. *Dinamika pendidikan islam di Indonesia pasca kemerdekaan*. Rajawali Prees. Jakarta. 2009
- Muhmudayeli. *Filsafat pendidikan*. Refika Aditama. Bandung. 2011
- Rambe. Syafrizal. *Serikat islam pelopor Nasionalisme Indonesia*. Yayasan kebangkitan insan cendikia. 2008
- Nurliana, N., & Ulya, M. (2019). Pendidikan Berbasis Motivasi. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(2), 393-412.
- Nurliana, N. (2019). FORMULASI KELUARGA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 127-144.
- Nurliana, N. Transformasi Masyarakat Islam Era Revolusi Industri 4.0. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 107-121.
- Nurliana, N. (2017). Wanita Karir Menurut Hukum Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 70-100.
- Nurliana, N. (2017). Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab Subul Al-Salam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(2), 132-174.
- Sahertian. Plet. *Konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000
- UU. RI No. 23 tahun 2003. *Tentang sistem pendidikan Nasional*. Citra Umbara. Bandung. 2010
- Yatim. Badri. *Sejarah peradaban islam. Dirasah islamiyah II*. Raja Grafindo persada. Jakarta. 2008